

## **Distingsi<sup>1</sup> dan Identitas Islam pada Madrasah: Tinjauan Kebijakan Kurikulum Madrasah**

**Ainun Hakiemah**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
e-mail: ainunhakiemah@gmail.com

**Siswoyo Aris Munandar**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Pandanaran Yogyakarta  
e-mail: siswoyoaris31@gmail.com

### **Abstract**

*Madrasa was born as the answer for the restlessness of pesantren on the existence of schools established by the dutch. After the independence of Indonesia, madrasahs were still regarded as fringe classes. In early 1970s, the transformation of madrasa began to be initiated. In 1975, SKB 3 ministers which sets the content of religious lessons in declining madrasa appeared. This research is a literature study that examines the distinction and Islamic identity of the madrasa by reviewing the curriculum policy since the inception until the decline of KMA No. 184 in 2019. The results showed that the distinction and Islamic identity of the madrasa was still not optimal in producing the output of the Tafaqquh Fiddin, due to the large amount of subjects inserted within the curriculum by the ruling government. Although the equal position of madrasa in the national education constellation has been achieved, the marginalization of religious sciences in Madrasa has not ended. Meanwhile, students who strongly hold Tafaqquh Fiddin are needed at the time of the teenage radicalism.*

**Keywords:** *Distingsi, Islam, Madrasah, Curriculum*

### **Abstrak**

*Munculnya madrasah merupakan jawaban dari kegelisahan pesantren terhadap keberadaan sekolah yang didirikan oleh Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, madrasah masih dianggap sebagai kelas pinggiran. Pada awal tahun 1970, transformasi madrasah mulai dirintis. Pada tahun 1975 muncul SKB 3 menteri yang menetapkan muatan pelajaran agama di madrasah menurun. Penelitian ini adalah penelitian*

---

<sup>1</sup> Distingsi adalah derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda. <https://id.wikipedia.org/wiki/Distingsi>. Diakses 28 September 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, distingsi/dis-ting-si/ n perbedaan: memang ada diakses 28 September 2019, [www.abdimadrasah.com](http://www.abdimadrasah.com).

kepuustakaan yang mengkaji distingsi dan identitas Islam pada madrasah dengan meninjau kebijakan kurikulum madrasah sejak lahirnya hingga turunnya KMA No. 184 tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distingsi dan identitas Islam pada madrasah masih belum optimal dalam menghasilkan output yang *tafaqquh fiddin*, akibat peminatan dan besarnya muatan umum yang diberikan pemerintah. Meskipun kesetaraan madrasah dalam konstelasi pendidikan Nasional sudah tercapai namun marginalisasi ilmu-ilmu agama di madrasah belum berakhir. Sedangkan siswa yang *tafaqquh fiddin* saat ini sangat dibutuhkan di kala radikalisme marak di kalangan remaja.

**Kata Kunci:** *Distingsi, Islam, Madrasah, Kurikulum*

## Pendahuluan

Pesantren sebagai lembaga *indigenos* Indonesia, pada awalnya lebih banyak mencurahkan pada pendalaman ilmu-ilmu keagamaan (Islam) yang disertai pengamalan dan sering kali termasuk 'laku batin', jalan tasawuf, dengan pola hidup penuh kemandirian dan kesederhanaan. *Output* pesantren pada masa lalu dikenal mempunyai kelebihan dalam hal *tafaqquh fiddin* dan mudah melebur dengan masyarakat terutama kalangan *grass root*. Hal ini dikarenakan hidup dan tumbuh kembangnya pesantren masa silam berada di tengah masyarakat dan menyatu terhadap masyarakat, sehingga sikap *egaliter* dan sikap terbuka terhadap perbedaan dan keberadaan budaya *liyan* tidak bisa dipungkiri melekat pada santri.

*Egaliter* santri terutama karena kebiasaan hidup dengan pola sederhana dan melebur dengan masyarakat. Sedangkan sikap terbuka terhadap *liyan* termasuk ramah budaya dikarenakan ada tasawuf yang melekat pada diri santri di masa silam. Sebagaimana sisi mata uang, tasawuf pun menempati posisi ini bagi santri. Satu sisi 'ramah' terhadap perbedaan karena memandang sesuatu secara hakikat, nilai, substansi. Namun di sisi lain ketasawufan ini juga berimbas pada munculnya masa kejumudan di pesantren. Akibatnya pesantren menjadi terkesan terbelakang, tradisional, dan tidak mengikuti zaman.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Walaupun pesantren termasuk lembaga pendidikan tradisional, akan tetapi eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam di era modern tidak bisa lepas dari peran kepemimpinan kiai dalam memelihara tradisi pesantren dari pengaruh budaya luar. Baca Zainal Arifin, "The Authority of Spiritual Leadership at

Kedadaan tersebut menimbulkan kegelisahan bagi banyak kalangan saat itu beriringan dengan kemunculan sekolah milik kolonial Belanda (non muslim) dan juga momentum gerakan pembaharuan Islam di berbagai negara Timur (Islam), negara yang dijajah Barat (non-muslim). Kegelisahan tersebut kemudian dijawab pesantren dengan berdirinya madrasah pada masa itu. Sebelum menjadi madrasah secara ‘resmi’, beberapa sekolah Islam (madrasah) telah ada di beberapa wilayah di Indonesia. Meskipun demikian, pengelolaannya belum dilakukan secara modern (belum tertata).

Oleh karena itu, penting kiranya mengkaji ulang konsep integrasi ilmu pada madrasah<sup>3</sup> dengan tanpa mengabaikan kebijakan kurikulum yang berlaku dari waktu ke waktu sejak lahirnya madrasah hingga saat ini dengan melihat dan mengkritisi kebijakan terakhir pemerintah yaitu KMA No. 184 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah, yaitu implementasi Kurikulum 2013. Hal tersebut tentunya tidak bisa lepas dari aturan yang dikeluarkan pemerintah dan harus merunut proses panjang kurikulum madrasah dan kesejarahan madrasah itu sendiri tanpa mengesampingkan pesantren sebagai induknya. Cakupannya begitu luas untuk mengkritisi sehingga makalah ini mencoba ‘mengronologikan’ dari ‘benih’ madrasah, dari induknya pesantren, sampai pada realitas madrasah saat ini, untuk menemukan distingsi dan identitas Islam dikaitkan dengan konsep integrasi ilmu yang ada pada madrasah.

### **Madrasah atau Sekolah Islam di Masa-Masa Awal (Antara Pesantren dan Sekolah)**

Sekolah Islam yang berdiri di wilayah Minangkabau di antaranya *Adabiyah School* (Madrasah Adabiyah) yang berdiri pada tahun 1907 di Padang Panjang namun belum sampai setahun mengalami kegagalan dan berpindah tempat ke Padang.<sup>45</sup> Selanjutnya pada tahun 1915 justru berubah

---

Pesantren Temboro Based on Jamaah Tabligh Ideology’,” *Jurnal Pendidikan Islam* 6 (2), (2017): 266.

<sup>3</sup> Madrasah yang dimaksudkan pada artikel ini adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) atau yang setara dengan ketiganya seperti Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), dan semacamnya, bukan madrasah diniyah.

<sup>4</sup> Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media, 2007), hlm. 99.

menjadi HIS (*Hollands Inlandsche School*), identik sebagai sekolah umum dengan tambahan muatan agama di dalamnya. Pada tahun 1910, Sekolah Agama (*Madras School*) didirikan di Batusangkar namun 1913 madras tersebut akhirnya ditutup. Tahun 1918, Mahmud Yunus mendirikan *Diniyah School* yang merupakan kelanjutan *Madras School*. Sekolah serupa (*Diniyah School-Madras School*) juga didirikan di tempat lain pada 1915 di Padang Panjang, Madrasah Diniyah pada sore hari yang diorganisasi secara klasikal dengan penambahan pelajaran ilmu bumi dan sejarah, dan sebagainya.<sup>67</sup>

Adapun yang di Jawa, antara lain Madrasah Mambaul Ulum Surakarta merupakan madrasah pertama di Jawa dari kalangan pesantren. Madrasah ini didirikan pada tahun 1906 dengan memasukkan pelajaran menulis, aljabar, dan berhitung selain agama tentunya. Madrasah Salafiyah Tebuireng Jombang didirikan tahun 1916 yang kemudian eksis dan berkembang sampai saat ini, selain itu Madrasah Muhammadiyah berdiri tahun 1918 yang juga masih eksis hingga saat ini yang sekarang dikenal dengan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dan masih banyak madrasah yang berdiri pada tahun tersebut. Menurut Haidar Putra Daulay, madrasah-madrasah pada masa itu baik yang dikelola secara pribadi maupun oleh organisasi belum menampakkan kesesuaian dalam berbagai hal seperti jenjang pelajaran, lamanya belajar, maupun kurikulumnya. Perbandingan dan bobot pelajaran umum dan agama juga berbeda antara satu madrasah dengan yang lain.<sup>8</sup>

Madrasah lahir dan berkembang seiring perjalanan waktu, melalui banyak periode kepemimpinan dengan kepentingan dan kebijakannya, dari mengonter sekolah Belanda sampai mengimbangi (atau mengekor?) kebijakan sekolah modern. Dari memberi porsi besar pada muatan keagamaan dan menjadikan muatan umum sebagai 'tambalan' sampai

---

<sup>5</sup> Lihat juga Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 122.

<sup>6</sup> Ibid., Lihat juga Amirwan, "Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia" dalam Samsul Nizar, *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara* (Jakarta: Kencana Media, 2013), hlm. 265-271.

<sup>7</sup> Abuddin Nata, *Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 299.

<sup>8</sup> Nizar, *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*, hlm. 265-271.

berbalik memperbesar muatan umum dan memperkecil muatan agama. Konsekuensinya *output* madrasah saat ini dikenal minim dalam hal *tafaqquh fiddin*<sup>9</sup> sedangkan kemampuan muatan umum –apalagi materi sains- tidak bisa dipungkiri hanya mencapai ‘seadanya’. Belum lagi jika berbicara nilai tasawuf pada madrasah, sangat jauh dari induknya, pesantren (masa awal) dan justru mengikuti *ala* sekolah. Terkesan bahwa madrasah hanya sebagai “antara”, tidak pesantren dan tidak sekolah. Meskipun sebenarnya menginginkan ‘merangkul’ keduanya namun realitasnya saat ini, madrasah berada pada posisi ‘nanggung’ dalam hal keilmuan akibat beratnya beban muatan yang ditanggung oleh anak madrasah.

### **Sejarah Panjang Madrasah dan Kebijakan Pemerintah Masa Lalu**

Pesantren pada awal abad ke-19 merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang hampir menyeluruh di berbagai wilayah Indonesia, sesudah pengajian al-Qur’an. Kolonial Belanda yang pada saat itu masih menguasai Indonesia memiliki lembaga pendidikan sendiri<sup>10</sup> yang tidak ada kaitan sama

---

<sup>9</sup> Dalam penelitian dijelaskan bahwa saat ini penerus pesantren (anak-anak kiai) banyak yang tidak bisa membaca kitab dan tidak mengetahui khazanah kitab kuning sebagai imbas dari dikirimnya mereka ke lembaga pendidikan formal. lihat Najib Kailani, “Ulama dan Narasi Politik Perbedaan: Minoritas, Etnisitas, dan Kewargaan di Palangkaraya” Noorhaidi Hasan, *Ulama Politik dan Narasi Kebangsaan; Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-kota Indonesia* (Yogyakarta: Puspidep, 2019), hlm. 210.

<sup>10</sup> Kolonialisme Belanda di Indonesia secara garis besar terjadi dalam dua periode, yaitu sebelum masa *interregnum* Inggris (1811-1816) dan setelah tanah jajahan dikembalikan lagi oleh Inggris ke Belanda tahun 1816. Pada periode sebelum masa *interregnum* Inggris, pendidikan Belanda awalnya lebih berorientasi pada pendidikan keagamaan yang bertalian dengan gereja, sebagai bentuk penyebaran agama kolonial di Indonesia. Perkembangan selanjutnya kolonial Belanda tidak lagi mempunyai hasrat untuk penyebaran agama dan lebih pada masalah kekuasaan *oriented*, sehingga pendidikan yang diselenggarakan pun untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Setelah tanah jajahan (Indonesia atau sebutan Hindia Belanda di masa tersebut) dikembalikan oleh Inggris kepada Belanda, pendidikan di Indonesia berada dalam keadaan yang memprihatinkan. Jatuhnya VOC tahun 1816 memperparah pendidikan di Indonesia dan ini jika dibiarkan tentu akan semakin merugikan kolonial. Sehingga pada tahun 1854 pemerintah kolonial Belanda menyatakan bahwa Hindia Belanda sebagai tanah jajahan harus memberi keuntungan bagi Belanda dan salah satunya dengan memulai sistem pendidikan dari dasarnya. Pemerintah baru yang diresapi ide

sekali dengan pendidikan Islam. Rencana perbaikan pendidikan pribumi di masa itu hanya menghasilkan *softmap* tentang keadaan pendidikan pribumi seperti keadaan pendidikan di pesantren, pendidikan di kraton, dan pendidikan tradisional lainnya. Berbagai masukan termasuk peningkatan pendidikan pribumi dengan memperbaiki secara bertahap sistem pendidikan asli yang sudah ada dan penilaian positif asli Indonesia dalam perkembangan modern tidak direspons pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial justru mengadakan sistem pendidikan sendiri tanpa mengakar pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pribumi. Pada wilayah Katolik-Kristen, diadakan sekolah untuk persiapan kebaktian meliputi pelajaran membaca, seni musik, dan sedikit ilmu Bumi. Adapun wilayah Islam, diselenggarakan sekolah pemerintah dengan sistem pendidikan Belanda, adapun sistem pendidikan Islam menjadi terisolasi, tidak mendapatkan pengakuan resmi pemerintah. Hal tersebut merupakan latar belakang munculnya pemisahan antara sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan agama (Islam) di Indonesia pada masa terakhir abad ke-19.<sup>11</sup>

Sekolah dengan sistem pendidikan Belanda sebagaimana di atas selanjutnya mulai banyak bermunculan di Indonesia, keadaan tersebut menjadikan keresahan bagi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam terbesar di Indonesia. Selain karena *vis a vis* dengan perkembangan sistem pendidikan Belanda, pendidikan tradisional pesantren juga dihadapkan pada arus modernitas yang terjadi pada saat itu. Dalam konteks ini maka terjadi *modernisasi*<sup>12</sup> pendidikan Islam di Indonesia, di antaranya muncul sekolah

---

*liberal Aufklarung* atau *Enlightenment* menaruh kepercayaan akan pendidikan sebagai alat kemajuan ekonomi-sosial, sehingga mulai tahun 1817 dibuka sekolah khusus bagi anak Belanda agar bisa lebih menguasai pendidikan dibanding pribumi. *Europese Lagere School* (ELS) merupakan sekolah rendah Belanda dan satu-satunya sekolah yang bisa menampung sejumlah kecil anak pribumi kalangan priyai kaya. Selanjutnya akibat terbongkarnya Sistem Tanam Paksa menjadikan Belanda dituntut untuk melakukan perbaikan terhadap pendidikan anak-anak Indonesia. lihat S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 4-14.

<sup>11</sup> Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 158-160.

<sup>12</sup> Modernisasi dalam ilmu sosial merupakan suatu bentuk transformasi dari kondisi yang kurang maju menuju yang lebih baik dalam mencapai kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan berkembang. Perubahan yang dimaksudkan

umum model Belanda dengan memasukkan muatan pengajaran Islam -suatu cikal bakal sekolah umum pada saat ini- selanjutnya sekolah atau madrasah yang mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda, yaitu sekolah Diniyah yang menerapkan model sistem pendidikan Belanda.<sup>14</sup> Seiring dengan alasan di atas selanjutnya kalangan reformis atau modernisme muslim, terutama lulusan Timur Tengah, menyuarakan bahwa pembaharuan pendidikan Islam tradisional yang ada pada saat itu, awal abad ke-20, merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari dan harus segera dilakukan termasuk pesantren.<sup>15</sup> Hal tersebut dikarenakan, menurut kalangan reformis-modernisme Islam, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang buruk secara sistem pendidikan dan manajerial serta mengalami *kejumudan* dan tertutup terhadap keilmuan umum non agama. Menurut Haidar Putra Daulay, madrasah berdiri di Indonesia pada awal abad ke-20 di antaranya karena tuntutan dari masuknya ide-ide reformis-modernisme yang salah satunya adalah pengintegrasian pengetahuan agama dan pengetahuan umum.<sup>16</sup>

Perkembangan pendidikan di Indonesia baik pendidikan Belanda maupun pendidikan Islam sistem Belanda dan ide-ide kalangan reformis-modernis Islam selanjutnya direspons oleh kalangan pendidikan tradisional Islam, seperti surau (Minangkabau) dan pesantren (Jawa).<sup>17</sup> Namun demikian

---

di sini yaitu perubahan dengan penggunaan akal atau rasio. Dalam istilah Nurcholis Madjid, dalam modernisme terdapat proses perombakan pola berpikir dan tata kerja dari yang tidak rasional menjadi lebih rasional. Dari pengertian tersebut, pada istilah modernisasi terdapat suatu perubahan, pergerakan, dengan menggunakan akal/rasio menuju ke arah yang lebih baik. Lihat Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), hlm. 180.

<sup>13</sup> Jazilus Sakhok, "Kebangkitan Islam dan Idea Modernisasi: Kajian ke Atas Pemikiran Intelektual Muslim di Indonesia dan Malaysia" (Disertasi, Universitas Malaya, 2014), hlm. 19-20.

<sup>14</sup> Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, hlm. 119-121.

<sup>15</sup> Azra, hlm. 119-121.

<sup>16</sup> Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 145.

<sup>17</sup> Lembaga pendidikan yang mirip dengan pesantren di Aceh dikenal dengan Dayah, di Malaysia disebut pondok dan di Thailand Selatan disebut Pho No. Lihat Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, "Educational Practice: Lessons to be Learned

kalangan pesantren menolak paham dan asumsi keagamaan kaum reformis-modernis juga menolak kebijakan pendidikan Belanda. Modernisme Islam dianggap kaku, puritan, dan anti budaya lokal, sedangkan sistem pendidikan (sekolah) Belanda cenderung bernuansa Barat, Kolonial, dan “kafir”, sehingga hal tersebut menginisiasi pesantren membuat sistem pembelajaran baru, yaitu madrasah, yang dimasukkan dalam kurikulum pesantren. Pada tahap ini pesantren mentransfer spirit kebangsaan-keindonesiaan dengan lahirnya madrasah sebagai sekolah yang berbeda dengan sekolah *ala* Belanda.<sup>18</sup> Hal ini menimbulkan asumsi sebagian kalangan bahwa madrasah pada hakikatnya merupakan bentuk lain dari sekolah yang hanya diberi muatan keislaman.<sup>19</sup>

Pada tahap awal kebanyakan madrasah masih pada tahap perubahan dari pendidikan *ala* pesantren dari aspek penampilan lahiriah saja, yaitu dengan pembelajaran menggunakan bangku, meja, dan papan tulis. Pada tahap ini kurikulum semakin diperluas namun masih dominan mata pelajaran agama yang berorientasi ke Makkah. Pada tahun 1930-an, pembaharuan madrasah terjadi dengan digunakannya buku-buku dari Mesir dan sedikit pengetahuan umum. Pada tahap ini pemerintah kolonial belum berpihak pada madrasah karena masih dianggap *marginal* dan tidak menguasai pengetahuan umum, selain itu juga dikhawatirkan mengancam eksistensi kolonial karena berorientasi ke Arab (Mekkah dan Mesir).<sup>20</sup>

---

from Madrasah and Religious Schools in Contemporary Southeast Asia,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 5, (1) (2015): 30 <https://doi.org/10.18326/ijims.v5i1.29-48>.

<sup>18</sup> Meskipun madrasah mengajarkan ilmu pengetahuan umum sebagaimana sekolah namun madrasah pada masa awal berdiri memiliki karakter khas yang sangat mengedepankan nilai religius bagi masyarakat dengan melalui penanaman nilai keislaman, sedangkan sekolah mempunyai muatan kurikulum yang sangat terpengaruh pemikiran enlightenment Barat. Madrasah cenderung merakyat untuk semua kalangan dan ini berbeda dengan sekolah yang cenderung elitis. Lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986).

<sup>19</sup> Kesamaan madrasah dengan sekolah modern dicirikan antara lain: penggunaan sistem kelas, pengelompokan pelajaran, penggunaan kursi dan bangku, dan dimasukkannya pengetahuan umum menjadi bagian dari kurikulumnya. Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 193.

<sup>20</sup> B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*, terj. Saafroedin Bahar (Jakarta: Grafiti Press, 1985), hlm. 120-122.

Pada tahun-tahun pertama sesudah 1946, Departemen Agama<sup>21</sup> mengambil kebijakan untuk menyesuaikan dengan sistem pendidikan Barat ketika K.H. Wahid Hasyim mengetuai departemen ini. Departemen Agama saat itu masih baru dibentuk, yaitu 3 Januari 1946 dengan bidang garapan madrasah, pesantren, dan pendidikan agama pada sekolah umum. Terkait dengan madrasah, Departemen Agama mengeluarkan Kebijakan di antaranya sebagai berikut:

Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1946 dan No. 7 Tahun 1950, madrasah mengandung makna: (a) Tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya. (b) Pondok dan pesantren yang memberi pendidikan setingkat dengan madrasah.<sup>22</sup>

Pelaksanaan kebijakan tersebut antara lain dengan melakukan propaganda dengan memasukkan mata pelajaran umum ke dalam madrasah.<sup>23</sup> Akibat kebijakan departemen ini, banyak pesantren membuat perubahan sistem pendidikannya. Perubahan sistem pendidikan yang semula hanya memberikan pengajaran Al-Quran dan kitab secara tradisional menjadi sistem klasikal dengan tahun pelajaran yang teratur, yang dikenal dengan nama “madrasah” baik yang sudah ditambah materi pendidikan umum maupun tidak sama sekali.<sup>24</sup>

Kebijakan tersebut, yaitu modernisasi di pesantren, sebatas anjuran dari departemen agama. Departemen Agama memberi kebebasan pelaksanaannya di level bawah, tanpa campur tangan apalagi mengambil alih terhadap sistem madrasah saat itu. Namun pesantren yang menerapkan modernisasi, mengikuti penentuan tahun ajaran baru dari negara dan menyelenggarakan pendidikan umum yang sesuai dengan instruksi atas yang

---

<sup>21</sup> Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 99.

<sup>22</sup> Daulay, hlm. 101.

<sup>23</sup> Azyumardi Azra, “Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan” dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. xv.

<sup>24</sup> Madrasah yang mulanya dimaksudkan untuk menyediakan pengajaran agama pada sore hari bagi siswa atau santri yang belajar di sekolah umum. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, hlm. 167.

kemudian diberikan subsidi oleh pemerintah.<sup>25</sup> Subsidi pemerintah kepada madrasah dalam bentuk material dan bimbingan berdasarkan peraturan menteri Agama No. 1 Tahun 1946 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama No. 7 Tahun 1952. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga disebutkan jenjang pendidikan pada madrasah antara lain: Madrasah rendah yang sekarang menjadi MI, Madrasah Lanjut Tingkat Pertama yang sekarang menjadi MTs, dan Madrasah Lanjut Atas yang sekarang menjadi MA.<sup>26</sup>

Kebijakan tersebut dilematik, bagi madrasah yang tidak mengikuti anjuran pemerintah maka tidak mendapatkan subsidi namun bisa secara leluasa mengelola pendidikan di dalamnya. Pada sisi lain, jika madrasah mengikuti anjuran pemerintah dengan sistem terpusat maka akan mendapatkan subsidi namun konsekuensi yang didapat tidak secara leluasa mengelola pendidikannya, termasuk adanya perubahan tahun ajaran yang di pesantren dan juga perubahan yang semula pengajaran dari 'Kiai Center' bergeser pada guru madrasah. Ini juga membawa konsekuensi yang semula otoritas di tangan pesantren *an sich* dengan adanya madrasah terutama madrasah umum menjadikan ada keterlibatan pemerintah di dalam pesantren.

Upaya pemerintah selanjutnya untuk meningkatkan status madrasah supaya mempunyai *bargaining* -daya tawar- dengan sekolah umum, di antaranya yaitu me-negeri-kan beberapa madrasah swasta dan tercatat terdapat ratusan madrasah swasta yang kemudian menjadi negeri pada saat itu. Mengingat bahwa pada saat itu madrasah masih dianggap *marginal*, kelas rendah, terpinggirkan, di hadapan sekolah umum bahkan 'ditolak' lulusannya untuk masuk ke lembaga pendidikan umum negeri baik sekolah negeri maupun perguruan tinggi negeri selain IAIN. Selain itu dari segi kesempatan kerja, lulusan madrasah saat itu hanya terbatas diterima di Departemen Agama dan tertutup di lembaga lain.<sup>27</sup> Pemerintah juga berupaya membuat madrasah yang sesuai kebutuhan pada saat itu, yaitu MWB (Madrasah Wajib Belajar) dengan muatan pelajaran umum dan agama dengan penambahan materi keterampilan, ekonomi-industri, dan transmigrasi. Orientasi

---

<sup>25</sup> Steenbrink, hlm. 167-168.

<sup>26</sup> Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 99-100.

<sup>27</sup> Daulay, hlm. 104-105.

madrasah ini menghasilkan *output* untuk memproduksi atau bertransmigrasi secara swadaya.<sup>28</sup>

Pada permulaan tahun 1970, Mukti Ali selaku Menteri Agama merintis jalan terang bagi transformasi madrasah di Indonesia, yang disebut oleh Azyumardi Azra sebagai '*mainstreaming of Islamic Education*', suatu arus utama pendidikan Islam agar tidak terpinggirkan.<sup>29</sup> Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri Tahun 1975, Bab I Pasal 1, menyebutkan: "Yang dimaksud dengan madrasah dalam Keputusan Bersama ini ialah: Lembaga Pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30%, di samping mata pelajaran umum."<sup>30</sup>

Berdasarkan diktum di atas maupun diktum sebelumnya dapat dipahami bahwa sistem dan isi madrasah diupayakan adanya penggabungan antara sistem pesantren dengan sistem sekolah umum, suatu upaya untuk mengonversi mata pelajaran umum dan agama. Konversi dan penggabungan tersebut tidak sama antara madrasah satu dengan yang lain karena Kementerian Agama hanya memberikan jumlah persentase keduanya dan tidak *breakdown* terhadap muatan pelajaran di dalamnya.<sup>31</sup> Pada konstelasi pendidikan Nasional, posisi madrasah pun semakin menguat dan semakin mempunyai *bargaining*.

Peraturan Menteri Agama terkait dengan lebih dominannya muatan pelajaran umum sekitar 70% tersebut mengesankan pelajaran agama sekedar sebagai pelengkap, meskipun demikian kedudukan mata pelajaran agama tetap memegang peranan yang sangat penting sebagaimana termuat dalam Kurikulum Madrasah Aliyah Tahun 1984 yang menyatakan bahwa Program Pilihan Ilmu-ilmu Agama sebagai bagian dari program pilihan di Madrasah Aliyah,<sup>32</sup> meskipun demikian jika melihat beberapa Program Pilihan di

---

<sup>28</sup> Daulay, hlm. 100.

<sup>29</sup> Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, hlm. 95.

<sup>30</sup> Azra, hlm. 95.

<sup>31</sup> Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 102-103.

<sup>32</sup> Daulay, hlm. 103. Tahun 1984 program di Madrasah Aliyah meliputi Program Inti dan Program Pilihan, adapun Program Pilihan antara lain: (1) Ilmu-ilmu Biologi,

Madrasah Aliyah pada saat itu maka siswa yang mendalami ilmu agama secara dominan semakin sedikit persentasenya.

Keprihatinan berikutnya yaitu dihapuskannya Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) dan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) yang digagas Menteri Agama Munawir Sjadzali untuk melahirkan kader-kader ulama justru terpinggirkan bahkan tidak tercantum dalam nomenklatur UU Sisdiknas 1989 dan 2003 dan kemudian dihapus pada masa berikutnya. Ini menjadikan kualitas madrasah dalam hal *tafaqquh fiddin* semakin minim. Bagaimanapun juga perubahan muatan kurikulum madrasah yang semula 100% agama menjadi 70% umum dan 30% agama membawa dua konsekuensi. Konsekuensi pertama yaitu terbukanya jalan bagi madrasah untuk setara dengan sekolah umum<sup>33</sup> namun konsekuensi lainnya madrasah pada akhirnya mengikuti kurikulum sekolah umum yang diterapkan Departemen Pendidikan<sup>34</sup> hingga saat ini.

Penyelenggaraan MAPK telah mengalami tiga perubahan nama dan kurikulum. Pada tahun 1994 nama MAPK diubah menjadi MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan). Pada tahun 2004 MAK berubah menjadi jurusan Ilmu Agama Islam (IAI). Pada 2007 mengubah program IAI menjadi Program Keagamaan (PK).<sup>35</sup> Walaupun model MAPK sudah dihapus menjadi PK, namun ada salah satu MAPK yang masih tetap eksis, yaitu MAPK Surakarta di bawah MAN I Surakarta. Eksistensi MAPK Surakarta karena ada dukungan semua *stakeholders* dan alumni, kurikulum, kebesaran nama 'MAPK' di mata

---

(2) Ilmu-ilmu Fisika, (3) Ilmu-ilmu Budaya, (4) Ilmu-ilmu Sosial, dan (5) Ilmu-ilmu Agama. Terkait bagaimana Program Ilmu-ilmu Agama dapat dilihat pada Peraturan Menteri Agama No. 101 Tahun 1984 Pasal 9 Ayat 1-3.

<sup>33</sup> Pencapaian fenomenal madrasah dalam hal kesetaraan dengan sekolah umum terutama pengakuan negara dari segi hukum melalui UU Sisdiknas No. 2/1989 dan UU Sisdiknas No. 20/2003. UU tersebut menunjukkan bahwa madrasah tidak lagi dalam posisi *marginal* dan terasing dalam sistem pendidikan Nasional.

<sup>34</sup> Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, hlm. 98-101.

<sup>35</sup> Munif Rofi'atur Rohmah dan Zainal Arifin, "Eksistensi dan Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) MAN 1 Surakarta," *Jurnal Pendidikan Madrasah* 2 (2), (2017): 371.

masyarakat, SDM yang berkualitas, program kelas internasional, alumni yang kompetensi dalam penguasaan ilmu agama, dan prestasi peserta didik.<sup>36</sup>

Madrasah secara *tafaqquh fiddin* mengalami penurunan kuantitas maupun kualitas, namun di saat yang sama justru animo masyarakat terhadap madrasah semakin tinggi. Masyarakat banyak menaruh harap pada madrasah akibat maraknya isu-isu negatif di kalangan remaja Indonesia terutama hadirnya Islam trans-Nasional<sup>37</sup> yang menyasar remaja di sekolah umum dan perguruan tinggi. Bukti tersebut antara lain terdapat pada kegiatan di kampus seperti gerakan dakwah kampus dengan Lembaga dakwahnya (LDK) dan mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diiringi dengan asistensi atau pendampingan agama Islam maupun di sekolah SMA dalam bentuk kelompok Rohaniwan Islam (Rohis) SMA, dan semacamnya.<sup>38</sup>

Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di negara muslim lainnya yang justru mengalami penurunan animo masyarakat masuk ke madrasah. Menurut Robert W. Hefner, sejak Taliban memasuki Kabul pada 26 September 1996, media Barat bergulat memecahkan pertanyaan tentang watak radikalisme Islam dan hubungannya dengan pendidikan agama. Sejumlah komentator dengan segera menyebut sumber kebangkitan kaum radikal tersebut ada pada madrasah, yakni sekolah agama yang diabdikan untuk studi tradisi keilmuan Islam dan Islam militan berada pada jantung kebanyakan madrasah itu. Meskipun demikian masyarakat Indonesia masih

---

<sup>36</sup> Rohmah dan Arifin, hlm. 382.

<sup>37</sup> Islam transnasional merupakan gerakan Islam mondial yang ingin memberlakukan formalitasi Islam di berbagai negara termasuk di Indonesia. Istilah lain yang serupa di antaranya adalah Islam radikal, Islam fundamentalis, Islam puritan, dan (yang disayangkan) dinamakan Islam kanan, dan penyebutan lain yang serupa. Kelompok-kelompok tersebut mempunyai karakter dan benang merah yang sama, kontradiktif dengan sistem demokrasi dan spirit pluralisme. Tedi Khaliludin, "Gerakan Islam Transnasional," diakses 15 September 2019, <http://www.gp-ansor.org>.

<sup>38</sup> Sebagaimana penelitian Najib Kailani, dkk dan riset Ma'arif Institute tentang gerakan dakwah kampus dan sekolah dalam Noorhaidi Hasan, "Menuju Islamisme Populer" dalam Noorhaidi Hasan, *Literatur Keislaman Generasi Milenial* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018), hlm. 1-6.

menaruh kepercayaan pada madrasah terbukti adanya peningkatan kualitas dan kuantitas madrasah.<sup>39</sup>

### **Realita Madrasah dan Kebijakan Pemerintah Masa Kini**

Transformasi dan pembaharuan madrasah menurut Azyumardi Azra mengalami *mainstreaming* dengan dikeluarkannya UU RI No. 20 Tahun 2003, sebagai bentuk terbukanya jalan kesetaraan bagi madrasah dari pendidikan Nasional secara keseluruhan. Madrasah tidak lagi terasing dan terpinggirkan. Meski demikian arus utama tersebut belum tuntas, dalam segi-segi perlakuan diskriminasi terhadap madrasah masih terjadi,<sup>40</sup> misalnya dari segi anggaran, peningkatan kualitas guru, dan sebagainya. Perlakuan diskriminatif tersebut sangat dirasakan terutama pada madrasah-madrasah swasta, yang jumlahnya 95% dari jumlah madrasah di Indonesia.

UU RI No. 20 Tahun 2003, mencita-citakan warganya untuk cerdas dan bertakwa, di antaranya melalui pendidikan dengan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang bertakwa, beriman, berilmu dan sebagainya dan menjadi warga yang demokratis-bertanggung jawab.<sup>41</sup> Sayangnya sampai saat ini, kualitas pendidikan bangsa Indonesia masih 'jauh panggang dari api'. Berdasarkan *Education Index* yang dikeluarkan oleh Human Development Reports, pada 2017, Indonesia ada di posisi ketujuh di ASEAN dengan skor 0.622. Skor tertinggi diraih Singapura, yaitu sebesar 0.832. Peringkat kedua ditempati oleh Malaysia (0.719) dan disusul oleh Brunei Darussalam (0.704). Pada posisi keempat ada Thailand dan Filipina (0.661). Jika melihat peringkat pendidikan negara-negara dunia, peringkat Indonesia sangat memprihatinkan jika disandingkan dengan negara-negara tetangga tersebut. Singapura (peringkat 9), Brunei Darussalam (peringkat 30), Malaysia (peringkat 62), Thailand (peringkat 89), dan Indonesia (peringkat 108).<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, hlm. 95-98.

<sup>40</sup> Azra, hlm. 98.

<sup>41</sup> Diakses 28 September 2019, [www.abdima.com](http://www.abdima.com).

<sup>42</sup> Indonesia menduduki posisi nomor 69 dari 76 negara. Inggris menempati peringkat 20, sedangkan beberapa negara Eropa lainnya berprestasi lebih baik. Amerika Serikat bertengger di posisi 28.

Hasil penilaian akreditasi secara nasional pendidikan di Indonesia masih mengesankan. Pada tahun 2018, hanya 55% yang memperoleh nilai B, baik sekolah maupun madrasah,<sup>43</sup> ini menunjukkan kualitas pendidikan Indonesia benar-benar memprihatinkan karena tidak hanya penilaian global tapi penilaian dari dalam negeri. Padahal sudah jamak diketahui bahwa akreditasi di Indonesia banyak melibatkan manipulatif administratif. Semestinya ini menjadi bahan evaluasi dengan kesadaran pentingnya memajukan bangsa melalui pendidikan tanpa tendensi kepentingan pribadi atau golongan.

Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan juga andil besar terhadap terpuruknya pendidikan Indonesia. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No.184 Tahun 2019, tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah, Kementerian Agama mencoba meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengganti KMA yang sudah ada sebelumnya, yaitu KMA No. 117 Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum di Madrasah yaitu Kurikulum Tahun 2013 (K13) yang juga digunakan oleh sekolah umum. Dengan dikeluarkannya KMA No. 117 Tahun 2014 bertujuan untuk mendorong dan memberi aturan berinovasi dalam implementasi Kurikulum 2013 (K13), juga memberikan payung hukum dalam pengembangan kekhasan madrasah, pendidikan anti korupsi, pengembangan penguatan karakter, dan pengembangan moderasi beragama pada madrasah.<sup>44</sup>

Namun jika melihat struktur kurikulum madrasah tampak bahwa muatan agama sebagai pembeda (distingsi) dan identitas Islam bagi madrasah tidak begitu berpihak, apalagi dengan buku yang dipakai di madrasah merupakan buku sekunder, menjadi Islam-nya siswa madrasah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan siswa sekolah umum. Adapun struktur kurikulum, sebagai misal pada struktur kurikulum siswa MA sebagai berikut:

- a. Contoh Struktur kurikulum MA Program Keagamaan (PK), yaitu (1) Kelompok A (Materi Wajib) meliputi PAI (Al-Qur'an Hadist, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam), PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Matematika, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, (2)

---

<sup>43</sup> Diakses 28 September 2019, <https://mediaindonesia.com/read/detail/204145-55-sekolah-dan-madrasah-terakreditasi-b>.

<sup>44</sup> Diakses 28 September 2019, [www.abdimadrasah.com](http://www.abdimadrasah.com)

Kelompok B (Materi Wajib) meliputi Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya dan Kewirausahaan, (3) Kelompok C (Peminatan) meliputi: Ilmu Hadist, Ilmu Kalam, Ilmu Tafsir, SKI, Akhlak, dan Ushul Fiqh, (4) Materi Lintas Minat (ekonomi dan sosiologi), (5) Muatan Lokal dan Pesantren meliputi Tahfidzul Qur'an, Bahasa Jawa, dan Pendalaman Peminatan (Informatika).

- b. Contoh Struktur Kurikulum Program IPS, yaitu (1) Kelompok A (Materi Wajib) meliputi PAI (Al-Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, SKI), PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Matematika, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, (2) Kelompok B (Materi Wajib) meliputi Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya dan Kewirausahaan, (3) Kelompok C (Peminatan) meliputi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi, (4) Materi Lintas Minat meliputi Biologi Lintas Minat dan Kimia Lintas Minat, dan (5) Muatan Lokal dan Pesantren meliputi Tahfidzul Qur'an dan Pendalaman Peminatan (Informatika).

Selanjutnya, dengan melihat struktur kurikulum MA berdasarkan K13, dapat dibuat tabel persentase muatan ilmu umum dan ilmu agama sebagai berikut:

**Tabel 1. Persentase Muatan Ilmu Umum dan Ilmu Agama**

Mata Pelajaran	IPA		IPS		Ilmu Budaya dan Bahasa		Ilmu-Ilmu Keagamaan	
	X	XI-XII	X	XI-XII	X	XI-XII	X	XI-XII
Agama-Bahasa Arab	23.5%	19.6%	23.5%	19.6%	23.5%	19.6%	23.5%	19.6%
Umum	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%
Peminatan	23%	31.5%	23%	31.5%	23%	31.5%	23%	31.5%
Lintas Minat	11.5%	7.9%	11.5%	7.9%	11.5%	7.9%	11.5%	7.9%

Dari tabel di atas dapat diketahui persentase muatan agama pada masing-masing kelas berdasarkan peminatannya di tingkat MA K13. Persentase muatan agama pada Kelas Peminatan IPA, IPS, dan Ilmu Bahasa dan Budaya sebanyak 23.5% di kelas X dan 19.6% di kelas XI dan XII. Jika dalam satu minggu diasumsikan 6 hari maka siswa belajar agama dalam

sehari hanya sekitar 3.5% - 4% dari 51 jam pelajaran (jpl) dengan tiap jamnya 45 menit sebagaimana yang ditetapkan K13. Siswa belajar agama selama sehari paling banyak sekitar 2 jam, sedangkan mata pelajaran umum antara 4-5 jam per hari.

Sedikitnya muatan agama di MA sangat berdampak pada kualitas pengetahuan agama siswa. Meski bertumpu pada kelas Program Ilmu-Ilmu Keagamaan, meskipun persentase muatan agama besar (sekitar 45% - 50%) dari keseluruhannya namun program ini tidak dimiliki semua MA. Buku pelajaran yang digunakan juga lebih sering diperdebatkan kevalidannya karena bukan berasal dari sumber primer. Hal tersebut menunjukkan secara kuantitas maupun kualitas siswa madrasah sulit mencapai *tafaqquh fiddin* tanpa adanya kebijakan yang mengikutinya.

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa beban belajar siswa di madrasah tidak sedikit namun demikian capaiannya tidak sesuai dengan ekspektasi sebagaimana peringkat pendidikan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara dunia. Banyaknya waktu belajar di madrasah tidak linier dengan capaian belajar apalagi dengan beban pelajaran yang banyak, buku pelajaran bukan primer, dan guru yang tidak berpihak ke siswa (tidak inovatif-kreatif dan tidak *student centered*) menjadikan semakin terpuruknya pendidikan di madrasah.

Keterpurukan juga bisa didorong oleh sistem sentralistis yang ditetapkan pemerintah untuk madrasah. Sebagaimana yang tertuang pada UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 38 mengenai kurikulum:

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah.
- (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah, artinya bahwa kurikulum masih bersifat birokratis dan mengikuti sistem sentralistis. Meskipun undang-undang tersebut mengangkat harkat madrasah dalam hal kesetaraan pendidikan Nasional namun membawa konsekuensi bahwa madrasah harus menerapkan kurikulum sebagaimana sekolah umum. Penjurusan juga mengikuti yang ada pada SMA terutama IPA, IPS, dan Ilmu Budaya dan Bahasa, sehingga jurusan umum sangat dominan di MA. Hasilnya muatan umum menjadi sangat dominan di madrasah termasuk MA di pesantren, padahal MA swasta banyak dimiliki oleh pesantren. Sedangkan madrasah swasta mempunyai persentase besar, mencapai 95% dari madrasah yang ada di Indonesia. Pada titik ini, secara tidak langsung sebenarnya terjadi pengerdilan terhadap ilmu-ilmu agama di pesantren, marginalisasi *tafaqquh fiddin* akibat dominasi jurusan dan mata pelajaran umum di MA.<sup>45</sup>

Konsekuensi lain dari adanya kurikulum sistem central membuat beban muatan pelajaran siswa madrasah semakin berat. Hal ini dikarenakan madrasah harus mengikuti kurikulum pendidikan sekolah umum ditambah muatan agama yang ditetapkan Kementerian Agama. Meskipun terdapat ruang gerak bagi madrasah pada mata pelajaran Lintas Minat namun ruang gerak tersebut masih dibatasi dengan porsi yang sangat kecil, hanya 7.9% - 11.5%. Permasalahan beban ujian juga menjadi hal yang harus ditanggung siswa madrasah di kelas XII yang meliputi Ujian Madrasah (Ujian Sekolah bagi siswa SMA), Ujian Akhir Madrasah Nasional (UAMB) yang dikelola Kementerian Agama, Ujian Nasional (UN) yang dikelola Kementerian Pendidikan. Pada akhirnya madrasah harus berupaya mencapai target yang terdapat pada kurikulum, karena hampir seluruhnya tersentral dan di ujungnya ditetapkan ujian secara Nasional.

Sistem sentral begitu membelenggu madrasah di semua lini, menjadikan *outputnya* minim yang *tafaqquh fiddin* dan minim yang menguasai ilmu umum, terutama ilmu sains, akibat berat dan banyaknya beban yang ditanggung, sistem sentral kurikulum dan juga buku pegangannya, serta manajemen birokrasi yang sentralistis pula. Sistem

---

<sup>45</sup> Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, hlm. 100-101.

sentralistis seperti di atas akan menghambat inovasi dan pembaruan di madrasah dan jelas mempengaruhi *output* pendidikannya. Tilaar menyebutkan, “kurikulum yang terpusat, penyelenggaraan sistem manajemen yang dikendalikan dari atas telah menghasilkan *output* pendidikan manusia robot tanpa inisiatif.”<sup>4647</sup>

## Simpulan

Awal kemunculan madrasah merupakan jawaban dari lembaga *indigenos* Indonesia (pesantren), terhadap kegelisahan atas keberadaan sekolah-sekolah yang didirikan oleh kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, madrasah masih dianggap sebagai kelas pinggiran. Kementerian Agama pada tahap awal, memberikan anjuran kepada individu atau masyarakat untuk mendirikan madrasah. Pada tahap ini, madrasah hanya mengubah penampilan fisik pembelajarannya dibanding masa sebelumnya (surau dan pesantren). Adapun mata pelajaran umum diberikan dengan komposisi yang sangat sedikit dan tanpa intervensi negara.

Lulusan madrasah sampai saat ini belum menghasilkan *output* yang *tafaqquh fiddin*, akibat adanya peminatan dan besarnya muatan umum yang diberikan oleh pemerintah. Sistem sentral terpusat kurikulum dan birokrasi madrasah masih sangat lekat termasuk sentralistis buku pelajaran. Hal ini menjadikan *output* madrasah serba tanggung dan pendidik maupun tenaga kependidikannya cenderung disibukkan oleh urusan administratif-birokratis yang diminta oleh pusat. Meskipun kesetaraan madrasah dalam konstelasi pendidikan Nasional sudah tercapai namun marginalisasi ilmu-ilmu agama di madrasah belum berakhir kecuali Indonesia tidak khawatir terhadap minimnya orang yang *tafaqquh fiddin*. Sedangkan siswa yang *tafaqquh fiddin* saat ini sangat dibutuhkan di kala radikalisme marak di kalangan siswa, mahasiswa dan remaja. Distingsi dan identitas Islam pada madrasah perlu digalakkan kembali, sehingga siswa bisa berada di garda depan dalam melawan radikalisme dan penjaga budaya dan eksistensi Indonesia sebagaimana induknya, pesantren.

---

<sup>46</sup> H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad ke-21* (Magelang: Tera Indonesia, 1999), hlm. 87.

<sup>47</sup> Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, hlm. 175.

## Daftar Referensi

- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Asrohah, Hanun. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos, 1999.
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. "Educational Practice: Lessons to Be Learned from Madrasah and Religious Schools in Contemporary Southeast Asia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 5 (1), (2015), <https://doi.org/10.18326/ijims.v5i1.29-48>.
- Arifin, Zainal, "The Authority of Spiritual Leadership at Pesantren Temboro Based on Jamaah Tabligh Ideology'." *Jurnal Pendidikan Islam* 6 (2), (2017).
- Boland, B.J. *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*. Terj. Saafroedin Bahar. Jakarta: Grafiti Press, 1985.
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Media, 2007.
- Hasan, Noorhaidi. *Literatur Keislaman Generasi Milenial*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018.
- . *Ulama Politik dan Narasi Kebangsaan; Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-kota Indonesia*. Yogyakarta: Puspidep, 2019.
- <https://mediaindonesia.com/read/detail/204145-55-sekolah-dan-madrasah-terakreditasi-b>. [Diakses 28 September 2019]
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Distingsi>. [Diakses 28 September 2019]
- Khaliludin, Tedi. "Gerakan Islam Transnasional." Diakses 15 September 2019. <http://www.gp-ansor.org>.
- Madjid, Nurcholish. *Bilik-bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- . *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan Pustaka, 2008.
- Nasution, S. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Nata, Abuddin. *Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nizar, Samsul. *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*. Jakarta: Kencana Media, 2013.
- Rohmah, Munif Rofi'atur, dan Zainal Arifin. "Eksistensi dan Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) MAN 1 Surakarta." *Jurnal Pendidikan Madrasah* 2 (2), (2017).

- Sakhok, Jazilus. "Kebangkitan Islam dan Idea Modernisasi: Kajian ke Atas Pemikiran Intelektual Muslim di Indonesia dan Malaysia." Disertasi, Universitas Malaya, 2014.
- Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- . *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Tilaar, H.A.R. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad ke-21*. Magelang: Tera Indonesia, 1999.
- [www.abdimadrasah.com](http://www.abdimadrasah.com). [Diakses 28 September 2019]
- [www.abdima.com](http://www.abdima.com). [Diakses 28 September 2019]
- [www//kbbi.web.id/distingsi](http://www//kbbi.web.id/distingsi). Diakses 28 September 2019